

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah dan dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati serta untuk Kota adalah Walikota dan Wakil Walikota.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada

kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraann Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal membuat terjadinya perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari *Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis* menjadi *Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis*. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Kota karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan Pemerintah Daerah

adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Akan tetapi, masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Dalam hal ini, dibutuhkan analisis laporan keuangan dengan tepat dan akurat. Untuk melakukan analisis terhadap suatu laporan keuangan dapat menggunakan beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014”

1.2. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini sehingga dapat lebih terarah dan dapat berjalan dengan baik, adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu:

“Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari aspek Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen (DPPKAD) pada tahun 2010 sampai dengan 2014”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dalam Penulisan Tugas Akhir ini dapat dibedakan berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan koreksi untuk meningkatkan kinerja serta kemampuan keuangannya pada tahun-tahun berikutnya

2 Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

3 Bagi Penulis

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.4. Cara Pengumpulan Data

1.4.1. Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari DPPKAD Kabupaten Kebumen. Data yang diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa: gambaran umum Kabupaten Kebumen dan gambaran umum DPPKAD Kabupaten Kebumen. Sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2010-2014.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir yaitu dengan metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literature, jurnal – jurnal, media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam penulisan laporan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan secara lengkap sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, beserta visi, misi, tugas, fungsi, kedudukan, dan lokasi instansi. Selain itu juga menjelaskan struktur organisasi dan deskripsi tugas dari masing-masing bagian sesuai dengan jabatannya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi perhitungan rasio yang digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan atas bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya serta memberikan saran sesuai topik yang dibahas.